



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**EVALUASI RENCANA  
KERJA TRIWULAN IV**





## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat Taufik dan Hidayahnya sehingga penyusunan **“EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV”** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan .

Maksud dan tujuan penyusunan **“EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULANI IV”** Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini adalah untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian kinerja tiap triwulannya pada kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama, sehingga tersusunnya **“EVALUASI RENCANA KERJA TRIWULAN IV”**. Kami mengharapkan saran dan masukan sehingga ke depannya dapat lebih baik lagi.

Demikian laporan ini disusun kiranya bermanfaat adanya.

**Telukbetung, Januari 2022**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG,**

**YURNALIS, S.IP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690710 199003 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB. I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Indikator Sasaran, Program, Indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan	2
<b>BAB. II      PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA OPD</b>	<b>7</b>
<b>BAB. III     CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Kesesuaian Program dan Kegiatan antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD Tahun 2021	13
3.2 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja OPD Triwulan IV Tahun 2021	16
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021/IKU Perangkat Daerah	36
<b>BAB. IV     HAMBATAN DAN KENDALA</b>	
4.1 Hambatan dan Kendala	43
4.2 Upaya Pemecahan Masalah	43
<b>BAB. V      PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan	44
5.2 Rekomendasi	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagaimana Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah, bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu perlunya evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja yang telah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sebagai pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja.

Evaluasi hasil Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan Visi, Misi dan Sasaran Pembangunan Tahunan Daerah sesuai Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung 2019 - 2024. Evaluasi hasil Renja ini merupakan instrumen dari pengukuran hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, target dan pagu anggaran.

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA TA. 2021) serta untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran. Pada penilaian evaluasi digunakan untuk mengetahui realisasi capaian kinerja dan capaian keuangan serta Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah, sehingga dapat diketahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan setiap pertriwulan, evaluasi ini bertujuan untuk mengambil langkah-langkah penyempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam Renja (Rencana Kerja) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA).

## 1.2 Tujuan

Rencana Kerja BKD Provinsi Lampung Tahun 2021 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021. Sedangkan tujuan dari disusunnya Evaluasi Renja BKD Provinsi Lampung Tahun 2021 mengacu pada Tujuan Renstra BKD Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024 yaitu :

### **“Mewujudkan Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen PNS”**

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana dalam keputusan menteri tersebut dijabarkan bahwa didalam kegiatan terdapat sub kegiatan, karena adanya perubahan tersebut maka dokumen Perencanaan BKD Provinsi Lampung harus mempedomi perubahan Dokumen RPJMD Provinsi Lampung yang dibuat dalam kurun waktu 5 tahun sekali. Dengan adanya perubahan tersebut demi untuk keselarasan terhadap Renstra 2019 – 2024 perlu penyesuaian tujuan dari Renstra itu sendiri dan memformulasikan indikator yang ditetapkan, maka tujuan yang tertuang dalam dokumen Evaluasi Renstra BKD Provinsi Lampung Tahun 2021 – 2024 yaitu :

### **“Terwujudnya Profesionalisme PNS”**

## 1.3 Indikator Sasaran, program, indikator kinerja dan kelompok sasaran dan kegiatan

Indikator sasaran merupakan indicator kinerja utama, indikator sasaran berguna untuk memperoleh atau mengukur suatu keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategi organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Agar terlaksananya Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung maka Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung memiliki beberapa Indikator Sasaran, adapun Indikator Sasaran tersebut bertujuan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Berikut Program Kegiatan serta Sub kegiatan yang dikelompokkan dalam sasaran IKU (Indikator Kinerja Utama).

**Tabel. 01**  
**Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja serta Kelompok Sasaran Berdasarkan Keputusan menteri dalam negeri No. 050-3708 Tahun 2020**

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KELOMPOK SASARAN
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		
<b>KEGIATAN PENGADAAN PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN</b>	<b>Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian</b>	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTHL	(IKU 1)
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik (IKU 2)
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, pembekalan kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ KORPRI	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat, dan pengembangan Sistem Berbasis Android	
Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang akurat	
<b>KEGIATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN</b>	<b>Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional</b>	
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan pejabat yang telah mengikuti kompetensi	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta Praja IPDN yang terbina dan PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar	
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional	
<b>KEGIATAN PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR</b>	<b>Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung</b>	
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung	
Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji	
<b>KEGIATAN MUTASI DAN PROMOSI ASN</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN</b>	
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat dan Surat SK Kenaikan Gaji Berkala	
Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	

**Tabel.02**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Berdasarkan Keputusan menteri dalam negeri No. 050-3708 Tahun 2020**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-			
				(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(2)	(3)	(4)	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya Profesionalisme PNS	Meningkatnya penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	65%	70%	75%	80%
		Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	58%	79%	91%	100%

1. Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi.

Untuk mengukur tingkat persentase yang dicapai dengan mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan terdiri dari :

- ▶ Jumlah JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) tahun 2020 sebanyak 48 orang
- ▶ Jumlah JFT yang telah ditempatkan sesuai kompetensi pada tahun 2020 sebanyak 9.054 orang
- ▶ Jumlah CPNS 2019 yang ditempatkan sesuai kompetensi sebanyak 410 orang
- ▶ Jumlah pejabat administrasi yang telah ditempatkan sesuai kompetensi Tahun 2020 sebanyak 276 orang
- ▶ Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2020 sebanyak 15.624 orang.

*(sumber data BKD Provinsi Lampung, Desember 2020)*

formulasi :

$$\frac{\text{Jumlah penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensi}}{\text{Jumlah PNS (tahun berjalan)}} \times 100\%$$

$$\frac{9788}{15624} \times 100\% = 62.64\%$$





2. Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik

Untuk mengukur tingkat persentase kualitas pelayanan administarsi kepegawaian dilihat dari :

1. Berapa banyak Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang telah dilaksanakan
2. Penerapan Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun, berikut disajikan road map rencana Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang akan dilaksanakan :

**Tabel.03**  
**ROAD MAP RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ASN**  
**KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

2019	2020	2021	2022	2023	2024
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SIMPEDU</li> <li>2. E-KINERJA</li> <li>3. SAPKT (Pengenalan dan Uji Coba) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• e-KGB</li> <li>• e-Pensiun</li> <li>• e-Cuti</li> <li>• e-SLKS</li> <li>• e-Formasi JFT</li> <li>• e-Formasi JFU</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sentralisasi Server (KOMINFOTIK)</li> <li>2. Implementasi SAPKT</li> <li>3. Pengembangan Aplikasi e-Kinerja berbasis Android (SIKAP)</li> <li>4. Pengembangan Aplikasi e-Dokumen</li> <li>5. Penambahan Jenis Layanan Online pada SAPKT <ul style="list-style-type: none"> <li>• e-Tugas Belajar</li> <li>• e-Ijin Belajar</li> <li>• e-Pangkat</li> </ul> </li> <li>6. Sosialisasi Aplikasi e-Dokumen dan SAPKT (seluruh OPD, SMA, SMK dan SLB)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Aplikasi Seleksi Terbuka JPT</li> <li>2. Penambahan Jenis Layanan Online pada SAPKT <ul style="list-style-type: none"> <li>• e-KARIS/KARSU</li> <li>• e-KARPEG</li> <li>• e-Konversi NIP</li> </ul> </li> <li>3. Peremajaan e-Dokumen PNS pada seluruh OPD</li> <li>4. Ujicoba Tanda Tangan Digital pada Surat Kenaikan Gaji Berkala</li> <li>5. Video Aplikasi (Publikasi SAPKT), 4 video (SAPKT, e-Dokumen, e-KGB dan e-Pangkat)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi Database SIMPEDU dan Database SAPK BKN (Satu Data)</li> <li>2. Pengembangan SIMPEDU <ul style="list-style-type: none"> <li>• Back-End Process (Database SAPK)</li> <li>• Front-End Process</li> </ul> </li> <li>3. Pengembangan SAPKT <ul style="list-style-type: none"> <li>• Back-End Process (Koneksi dengan Database SAPK)</li> <li>• Front-End Process</li> </ul> </li> <li>4. Pembangunan Dashboard Data Kepegawaian <ul style="list-style-type: none"> <li>• EIS (Executive Information System)</li> <li>• Anjungan Data Kepegawaian</li> </ul> </li> <li>5. Peremajaan e-Dokumen ASN (lanjutan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Re-Design Website BKD Provinsi Lampung.</li> <li>2. Rencana PUPNSD (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Daerah) Provinsi Lampung.</li> <li>3. Peremajaan e-Dokumen ASN (lanjutan)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian (seluruh OPD, SMA, SMK dan SLB)</li> <li>2. Seluruh Pelayanan dan Informasi Berbasis Elektronik</li> </ol>

 Pink : sudah dilaksanakan  
 Hijau : akan dilaksanakan

$$\frac{\text{Jumlah pengembangan sistem pelayanan administrasi kepegawaian}}{\text{Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang akan dikembangkan}} \times 100\%$$

$$\frac{9}{24} \times 100\% = 37.5\%$$

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik pada BKD Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2020 sebesar 37.5%

Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung terdahulu masih melalui cara yang manual, akan tetapi karena adanya Road Map Rencana Pengembangan Sistem Informasi ASN yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2019 - 2024 hal ini dapat mempermudah proses alur kepegawaian yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung sehingga terintegrasi dengan baik dan mudah. Rencana Pengembangan Sistem Informasi kepegawaian ini dilakukan agar mengurangi pertemuan tatap muka secara langsung dan juga dapat mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan untuk menuju paperless.

## **BAB II**

### **PERSANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA DENGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH**

Program merupakan implementasi dari kebijaksanaan operasional Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Penyusunan program kegiatan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Lampung yang menyangkut mengenai kepegawaian sesuai kewenangan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung. Dikarenakan telah dikeluarkannya KEPMEN No. 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka perlu dilakukan evaluasi RPJMD dimana pada evaluasi RPJMD tersebut untuk setiap Perangkat Daerah perlu mengevaluasi Renstra 2019 – 2024.

Untuk saat ini Tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Memiliki 2 Program yaitu yang pertama Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri dari 5 Kegiatan dan 18 sub kegiatan, kedua Program Kepegawaian Daerah yang terdiri dari 4 kegiatan dan 13 sub kegiatan. Program kegiatan sub kegiatan tersebut berguna mendukung kinerja yang akan dilaksanakan. Sub kegiatan tersebut terdiri dari pagu pendanaan, indikator kegiatan dan target kinerja yang akan dicapai selama 1 tahun. Program kegiatan dan sub kegiatan ini telah terdapat dalam Renja (Rencana Kerja) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021, berikut Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 yang telah dilaksanakan :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah merupakan program pendukung dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana penunjang pelayanan di bidang kepegawaian, indikator kinerja program adalah Pelayanan administarsi perkantoran, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah

**b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pengelolaan keuangan perangkat daerah

**b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Jumlah kegiatan PWRI

**c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD**

Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran

**c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan, yang terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Jumlah komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor

**b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

**c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Jumlah Peralatan Rumah Tangga

**d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Jumlah barang cetak dan penggandaan

**e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**

Jumlah bahan bacaan

**f) Penyediaan Bahan/Material**

Jumlah Alat Tulis Kantor

**g) Fasilitas Kunjungan Tamu**

Jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan

**h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Jumlah Koordinasi dan Konsultasi

**d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan Jasa perkantoran yang tersedia yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

**b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor

**e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional**

Jumlah unit kendaraan dinas yang diperlihara

**b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang terpelihara

**c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Jumlah unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

**2. Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah merupakan program utama dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi kepegawaian indikator kinerja program adalah Persentase administrasi kepegawaian yang ditingkatkan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

Dengan Indikator kinerja Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN**

Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTHL

**b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian**

Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan

**c) Fasilitasi Lembaga Profesi ASN**

Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, pembekalan kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ KORPRI

**d) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian**

Jumlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat, dan pengembangan Sistem Berbasis Android

**e) Pengelolaan Data Kepegawaian**

Jumlah dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang akurat

**b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN**

Dengan Indikator kinerja Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN**

Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan pejabat yang telah mengikuti kompetensi

**b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN**

Jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta Praja IPDN yang terbina dan PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar

**c) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional**

Jumlah orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional

**c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Dengan Indikator kinerja Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**

Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung

**b) Pembinaan Disiplin ASN**

Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji

**d. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN Lampung yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Pengelolaan Mutasi ASN**

Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS

**b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN**

Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat dan Surat SK Kenaikan Gaji Berkala

**c) Pengelolaan Promosi ASN**

Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Mengingat bahwa dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021 seluruh Program dan Kegiatan harus menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka, untuk Dokumen Evaluasi Renja 2021 sudah seharusnya menyesuaikan dengan Keputusan Menteri yang dimaksud, yaitu yang terdiri dari 2 Program dan 9 Kegiatan serta 31 Sub Kegiatan.



### **BAB III**

## **CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**

Dalam rangka melaksanakan evaluasi renja yaitu evaluasi dari keberhasilan atas pencapaian tujuan dan realisasi anggaran yang dilaksanakan dalam suatu organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan. Pada tahun 2021 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung telah melaksanakan seluruh program kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan Renja (Rencana Kerja) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 serta KEPMEN 050 - 3708 Tahun 2020 yaitu Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah mengatur tentang:

- A. Tata Cara Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- B. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;
- C. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- D. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - Provinsi;
- E. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Fungsi - Kabupaten/Kota;
- F. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Provinsi;
- G. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Organisasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- H. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Sumber Pendanaan;
- I. Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Rekening Neraca.

### 3.1. Kesesuaian Program dan kegiatan antara Renja Perangkat Daerah dengan APBD Tahun 2021

**Tabel 0.4**  
**KESESUAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**ANTARA RENJA PERANGKAT DAERAH TERHADAP APBD TAHUN 2021**

KODE					URUSAN BIDANG	RKPD	APBD	KET
1					2	3	4	5
					<b>Urusan Pendukung</b>			
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>1</b>		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
5	03	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	√	√	Sesuai
5	03	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	√	√	Sesuai
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>1</b>		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
5	03	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	√	√	Sesuai
5	03	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	√	√	Sesuai
5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	√	√	Sesuai
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>1.1</b>		<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			
5	03	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	√	√	Sesuai
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	√	√	Sesuai
5	03	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	√	√	Sesuai
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	√	√	Sesuai
5	03	01	1.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	√	√	Sesuai
5	03	01	1.06	07	Penyediaan Bahan/Material	√	√	Sesuai
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	√	√	Sesuai
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	√	√	Sesuai
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>1.1</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
5	03	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	√	√	Sesuai
5	03	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	√	√	Sesuai
<b>5</b>	<b>03</b>	<b>01</b>	<b>1.1</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	√	√	Sesuai
5	03	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	√	√	Sesuai
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	√	√	Sesuai

5	03	02			<b>Program Kepegawaian Daerah</b>			
5	03	02	1		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			
5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	√	√	Sesuai
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	√	√	Sesuai
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	√	√	Sesuai
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	√	√	Sesuai
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	√	√	Sesuai
5	03	02	1		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>			
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	√	√	Sesuai
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	√	√	Sesuai
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	√	√	Sesuai
5	03	02	1		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>			
5	03	02	1.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	√	√	Sesuai
5	03	02	1.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	√	√	Sesuai
5	03	02	1.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	√	√	Sesuai
5	03	02	1		<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>			
5	03	02	1.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	√	√	Sesuai
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	√	√	Sesuai

### **3.2 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021**

Program Kegiatan utama yang akan dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung yang berisikan Realisasi anggaran dan Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan Rencana Kerja PD Tahun 2021 meliputi :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program penunjang suatu perangkat daerah dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi perkantoran sebagai sarana pelayanan di bidang kepegawaian, dengan indikator kinerja program adalah Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah dengan kegiatan dan output atau indikator kegiatan sebagai berikut :

##### **a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

###### **a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 52.105.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 26.185.000,- target kinerja 4 dokumen terdiri dari RKA Murni 2022, DPA Murni 2022, PK Murni 2022, s Manajemen Resiko sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 50.250.000,- dengan target 13 dokumen yang telah tersusun.

###### **b) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 46.780.217,- target kinerja 3 dokumen terdiri dari Evaluasi Renja Triwulan IV, LPPD LKPJ 2021, LAKIP Tahun 2021 dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 27.020.000 sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan

Triwulan IV sebesar Rp. 46.651.000,- dengan target 9 dokumen yang telah terevaluasi.

**b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase kesesuaian dokumen keuangan dan aset Perangkat Daerah yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 11.457.770.000,- berdasarkan perubahan 2021 pagu anggaran tersebut mengalami penambahan sebesar Rp. 184.859.759,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 11.642.629.759,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 3.169.320.872,- yaitu terbayarnya gaji PNS dan tunjangan PNS BKD Provinsi Lampung, sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 11.468.630.751,-

**b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan PWRI Rp. 250.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 137.314.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 237.314.000,-

**c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 15.719.500,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 22.064.500,- target kinerja 6 dokumen yang terdiri dari 2 laporan fungsional, 2 neraca, 2 BKU, dengan total kinerja 24 dokumen yang telah tersusun sampai dengan akhir tahun.

**c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang disediakan, yang terdiri dari 8 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah komponen peralatan listrik/penerangan bangunan kantor dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 7.603.300,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 884.000,- dengan target kinerja 33 buah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (lampu), sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 7.603.300,- dengan target 140 buah komponen instalasi listrik sampai dengan akhir tahun.

**b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 482.798.200,- lalu di Refocusing pada bulan April sebesar Rp. 223. 655.000,- yang dananya di alihkan ke penanganan COVID - 19 dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 4.900.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 219.994.000,-

**c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Peralatan Rumah Tangga dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 8.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 2.098.000,- yang terdiri dari pembelian keset, tissue, sapu ijuk, kemoceng, kotak sampah, lap pel sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 8.000.000,-

**d) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah barang cetak dan penggandaan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 20.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 4.883.400,- dengan target kinerja penjilidan dan cetak, sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 20.000.000,-

**e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bahan bacaan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 3.000.000 dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 3.000.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 3.000.000,-

**f) Penyediaan Bahan/Material**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Alat Tulis Kantor sebagai sarana penunjang perkantoran dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 30.396.800,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 7.098.100,- yang terdiri dari pembelian ATK dan materai, sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 30.394.300,-

**g) Fasilitas Kunjungan Tamu**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 11.641.000,- dengan terlaksananya rapat – rapat dalam maupun luar (snack rapat sebanyak 7 kali) sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 24.985.000,-

**h) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Koordinasi dan Konsultasi dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 561.029.000,- lalu pada bulan April di Refocusing menjadi Rp. 361.029.000,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID – 19 dan pada perubahan 2021 anggaran tersebut bertambah sebesar Rp.

163.200.000 sehingga total anggaran menjadi Rp. 524.229.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 244.142.994,- dengan terlaksananya perjalanan dinas dalam maupun luar kota sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 524.093.844,-

**d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan Jasa perkantoran yang tersedia yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 254.556.243,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 39.139.820,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 111.782.403,- dengan target kinerja 12 bulan terbayarkannya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebagai sarana rutinitas perkantoran. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 142.773.840,- disebabkan karena pembatasan rutinitas perkantoran dan kebijakan *Work From Home* sehingga kinerja diperkantoran menjadi terbatas.

**b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Jasa Tenaga Pelayanan Umum kantor dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 569.446.200,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 176.846.200,- dengan terbayarnya honorarium PTHL dan honor operator perencanaan/keuangan sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp.569.446.200,- dengan target kinerja 9 bulan yaitu terbayarnya honor PTHL.

**e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Dengan Indikator kinerja Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam kondisi baik yang tersedia yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :



**a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit kendaraan dinas perkantoran yang terawat dan dipelihara dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 239.338.000,- lalu difocusing pada bulan April menjadi Rp. 171.998.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV Rp. 85.274.175,- target kinerja 12 unit pemeliharaan kendaraan dinas sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 162.371.991,-

**b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit peralatan dan mesin kantor yang terawat dan terpelihara dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 28.900.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 9.460.000,- dengan terawatnya pemeliharaan 6 unit AC, 2 unit komputer dan pemeliharaan servis penyedot air sebagai penunjang urusan rutinitas perkantoran, sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 28.750.000,-

**c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah unit Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 30.400.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan III sebesar Rp. 0,- karena kegiatan ini telah terlaksana pada triwulan II sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 30.200.000,-

**2. Program Kepegawaian Daerah**

Program Kepegawaian Daerah merupakan program utama dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan administrasi kepegawaian indikator kinerja program adalah Persentase administrasi kepegawaian yang ditingkatkan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

**a. Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**

Dengan Indikator kinerja Persentase sistem informasi kepegawaian dan pelayanan administrasi kepegawaian yang terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTHL yang terbayarkan dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 5.540.314.344,- lalu anggaran tersebut di Refocusing pada bulan april sehingga berkurang menjadi Rp. 5.168.314.344,- yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID – 19 lalu pada saat perubahan 2021 anggaran tersebut berkurang kembali sebesar Rp. 163.040.150,- sehingga menjadi Rp. 5.005.274.194,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV yaitu sebesar Rp. 2.268.279.764,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 3.902.046.432,- dengan hasil terlaksananya koordinasi dan konsultasi pengadaan CPNS 2021 dengan jumlah 140 orang yang dinyatakan lulus pada tahap akhir, pembayaran BPJS, dan pengurusan administrasi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 1.103.126.762,- dikarenakan jumlah pelamar pada kegiatan CPNS tidak dapat diprediksi, untuk tahun 2021 pelamar hanya 3.558 orang sedangkan pada tahun 2019 peserta mencapai 14.987 orang, BPJS Kesehatan terdapat sisa anggaran dikarenakan terdapat selisih dari harga satuan dalam DPA dengan tagihan dari BPJS karena pembayaran iuran berdasarkan UMK Kota Bandar Lampung Tahun 2021, BPJS Ketenagakerjaan terdapat selisih antara harga satuan/perorangan dengan tagihan dari BPJS Ketenagakerjaan.

### Pengadaan ASN Tahun 2021

No	ASN	Alokasi Formasi	Jumlah Formasi	Pendaftar	Lulus	Keterangan
1.	PPPK	Tenaga pendidikan	277	2.275	257	Pelaksanaan Dinas Pendidikan
2.	CPNS	Tenaga Kesehatan	102	1.122	92	Kepgub Lampung No. G/326/VI.04/Hk/2021 tentang Penetapan Kebutuhan ASN TA.2021
		Tenaga Teknis (CPNS)	50	2.569	48	
		<b>Total</b>	<b>427</b>	<b>5.966</b>		

#### Pengurusan Administrasi PNS Triwulan I

No	Kegiatan	Jumlah
	<b><u>Administrasi PNS</u></b>	
1.	-Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	12 orang 100 orang 90 orang
	<b><u>Pengadaan mutasi pegawai</u></b>	
2.	-Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah -Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat	0 orang 0 orang
	<b><u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u></b>	
3.	-CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	0 465 orang

#### Pengurusan Administrasi PNS Triwulan II

No	Kegiatan	Jumlah
	<b><u>Administrasi PNS</u></b>	
1.	-Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	3 orang 89 orang 109 orang
	<b><u>Pengadaan mutasi pegawai</u></b>	
2.	-Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah -Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat	1 orang 1 orang
	<b><u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u></b>	
3.	-CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	0 orang 0 orang

#### Pengurusan Administrasi PNS Triwulan III

No	Kegiatan	Jumlah
	<b><u>Administrasi PNS</u></b>	
1.	-Kartu pegawai -Kartu suami -Kartu istri	2 orang 87 orang 50 orang
	<b><u>Pengadaan mutasi pegawai</u></b>	
2.	-Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah -Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat -Penugasan/Penarikan/Pengembalian Pegawai DPK	1 orang 4 orang 14 orang
	<b><u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u></b>	
3.	-CPNS ke PNS -Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	0 orang 150 orang

### Pengurusan Administrasi PNS Triwulan IV

No	Kegiatan	Jumlah
1.	<b><u>Administrasi PNS</u></b>	
	-Kartu pegawai	0 orang
	-Kartu suami	69 orang
2.	<b><u>Pengadaan mutasi pegawai</u></b>	
	-Mutasi pegawai dari instansi pusat ke daerah	0 orang
	-Mutasi pegawai dari daerah ke instansi pusat	7 orang
3.	<b><u>Kelengkapan Administrasi Kepegawaian</u></b>	
	-CPNS ke PNS	0 orang
	-Penerbitan SK Jabatan Pelaksana (yang sudah disesuaikan dengan perubahan dalam Permenpan 41 Tahun 2018)	50 orang

#### b) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan (BUP) dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.534.500,- realisasi pada Triwulan IV sebesar Rp. 13.229.000,- dengan target kinerja 622 orang pegawai yang memasuki batas usia pensiun. sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 35.096.200,-

#### Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW I Tahun 2021

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	137
Janda/Duda	29
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	3
Masa Persiapan Pensiun	0
Tewas	0
Uzur	0

#### Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW II Tahun 2021

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	158
Janda/Duda	25
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	3
Masa Persiapan Pensiun	0
Tewas	0
Uzur	0

**Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW III Tahun 2021**

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	175
Janda/Duda	40
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	2
Masa Persiapan Pensiun	0
Tewas	1
Uzur	0

**Rekap PNS memasuki Batas Usia pensiun TW IV Tahun 2021**

Jenis Pensiun	Jumlah/Orang
Batas Usia Pensiun	152
Janda/Duda	7
Atas permintaan sendiri (hak pensiun)	1
Masa Persiapan Pensiun	0
Tewas	0
Uzur	0

**c) Fasilitas Lembaga Profesi ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen pembinaan jiwa korsa, pembekalan kewirausahaan bagi anggota KORPRI yang memasuki masa Purna Bhakti, bantuan hukum bagi anggota KORPRI, pelaksanaan BAPOR dan IMTAQ KORPRI dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 756.535.679,- lalu anggaran tersebut di Refocusing menjadi Rp. 229.715.679 yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID - 19 pada saat perubahan 2021 anggaran tersebut mengalami pengurangan kembali menjadi Rp. 189.715.679,- realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp. 65.208.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 89.797.500,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 99.918.179,- dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang tidak terlaksana, dan dilaksanakan secara virtual.

No	Kegiatan	Jumlah	Keterangan
1.	Pembekalan PNS yang akan memasuki masa Phurna Bhakti	80 orang	Terlaksana
2.	Hut Provinsi	-	Tidak terlaksana
3.	Hut Korpri	-	Virtual
4.	Bapor dan Imtaq Korpri	-	Tidak terlaksana
5.	Lembaga Bantuan Hukum Korpri	-	Tidak terlaksana

#### d) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat, dan pengembangan Sistem Berbasis Android dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 132.515.100,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 1.785.000,- target kinerja 51 data (Cetak dan jilid buku saku kepegawaian Pemerintah Provinsi Lampung) sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 132.515.100,-

No	Jenis	Jumlah
1.	Buku saku kecil	24 buku
2.	Buku saku besar	24 buku
3.	Buku Penjagaan KGB	3 buku
4.	Buku daftar urut kepeangkatan	1 buku

#### e) Pengelolaan Data Kepegawaian

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang akurat dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 103.580.000,- pada saat perubahan 2021 pagu anggaran mengalami perubahan berkurang sebesar Rp. 15.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 88.580.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 12.485.400 ,- dengan target kinerja 1930 dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang dapat diakuratkan. sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 88.248.500,-

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	3000 dokumen	Triwulan I
2.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	5570 dokumen	Triwulan II
3.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	4500 dokumen	Triwulan III
4.	Peremajaan data kepegawaian pada SIMPEDU dan SAPK	1930 dokumen	Triwulan IV

## b. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Dengan Indikator kinerja Persentase pengembangan jabatan sesuai kompetensi, ujian dinas, upkp dan Penataan dan Pembinaan jabatan fungsional yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

### a) Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan pejabat yang telah mengikuti Uji kompetensi dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 573.636.098,- lalu berdasarkan refocusing pada bulan April anggaran menjadi Rp. 429.636.098,- yang danaya dialihkan untuk penanganan COVID - 19 pada saat perubahan 2021 pagu anggaran mengalami perubahan berkurang sebesar Rp. 27.000.000,- realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 26.715.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 366.131.500,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 36.504.598,- dikarenakan peserta Uji Kompetensi lebih sedikit dari target serta pelaksanaan Diklat masih dibatasi karena Covid-19.

No	Kegiatan	Jumlah
1.	Pelaksanaan Uji Kompetensi	348 orang

Diklatpim				Prajabatan Umum		Diklat Teknis Fungsional
I	II	III	IV	Gol II	Gol III	
-	3 orang	-	-	36 orang	49 orang	1 orang

### b) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang lulus ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta Praja IPDN yang terbina dan PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 427.676.915,- pada saat perubahan 2021 pagu anggaran mengalami perubahan berkurang sebesar Rp. 63.200.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 364.476.915,- realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 82.088.000,- dengan terlaksananya pelaksanaan

Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat, serta terlaksananya proses pengantaran Praja IPDN sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 306.734.100,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 57.742.815,- dikarenakan untuk pencadangan anggaran yang akan melaksanakan Tugas Belajar.

**Jumlah PNS yang mengikuti Ujian Dinas Tahun 2021**

Ujian Dinas	2021
Tingkat I	239
Tingkat II	8

**PNS yang mengikuti UPKP Tahun 2021**

No.	Variabel	Lulus
1.	Basis S-2	10
2.	Basis S-1	34
3.	Basis D3	-
4.	Basis SMU	5
5.	Basis SMP	1

**IPDN yang dinyatakan lulus Tahun 2021**

Fasilitasi Pengantaran Praja IPDN
34 orang

**PNS yang mendapatkan bantuan Tugas Belajar Tahun 2021**

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (S2)	2 orang
2.	Strata 3 (S3)	1 orang

**c) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 61.736.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 16.241.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 49.811.100,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 11.924.900,- dikarenakan pelantikan pejabat PSO yang dilaksanakan pada 31 Desember 2021.



### Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan I

	Tingkatan	Jumlah
SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	141
	Pengangkatan kembali	9

### Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan II

	Tingkatan	Jumlah
SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	50
	Pengangkatan kembali	5

### Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan III

	Tingkatan	Jumlah
SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	0
	Pengangkatan kembali	0

### Realisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Triwulan IV

	Tingkatan	Jumlah
SK pengangkatan dalam jabatan Fungsional	Pengangkatan pertama kali dalam jabatan	41
	Pengangkatan kembali	12
	Penyetaraan pejabat administrator ke dalam pejabat fungsional	503

#### c. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Dengan Indikator kinerja Persentase kinerja aparatur dan Kedisiplinan PNS Provinsi Lampung yang terdiri dari 2 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

##### a) Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, monitoring evaluasi kinerja di PD dan sekolah - sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 285.177.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 171.602.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 239.581.700,- terdapat selisih anggaran

sebesar Rp. 45.595.300,- dikarenakan penundaan sosialisasi aplikasi SIKAP yang dilaksanakan pada 3 Januari 2022 dengan hasil kinerja evaluasi kinerja Perangkat Daerah sebagai berikut :

**Ucapan Ulang Tahun Triwulan I Untuk Pejabat di Tahun 2021**

<b>JUMLAH</b>	305
---------------	-----

**Ucapan Ulang Tahun Triwulan II Untuk Pejabat di Tahun 2021**

<b>JUMLAH</b>	392
---------------	-----

**Ucapan Ulang Tahun Triwulan III Untuk Pejabat di Tahun 2021**

<b>JUMLAH</b>	127
---------------	-----

**Ucapan Ulang Tahun Triwulan IV Untuk Pejabat di Tahun 2021**

<b>JUMLAH</b>	318
---------------	-----

**Pemberian Penghargaan SLKS Triwulan II di Tahun 2021**

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	83
XX	69
X	177

**Pemberian Penghargaan SLKS Triwulan IV di Tahun 2021**

MASA KERJA	JUMLAH
XXX	56
XX	86
X	127

**Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Kantor Virtual Pegawai (SIKAP)**

Gubernur Lampung Arinal Djunaldi

**Luncurkan Aplikasi "Sikap" untuk Tingkatkan Pelayanan Berbasis Digital**

© Selasa, 04 Januari 2022 00:00 WIB · Waktu Baca 2 menit



## b) Pembinaan Disiplin ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 49.309.500,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 27.516.500,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 44.057.900,-

### Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan I Tahun 2021

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	1 orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	2 orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	6 orang
<b>JUMLAH</b>		9 orang

### Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan II Tahun 2021

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	- orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	1 orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	1 orang
<b>JUMLAH</b>		2 orang

### Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan III Tahun 2021

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	1 orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	- orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	- orang
<b>JUMLAH</b>		1 orang

### Pelanggaran Disiplin PNS Triwulan IV Tahun 2021

NO	JENIS HUKUMAN	JUMLAH
1.	Hukuman Disiplin Ringan	- orang
2.	Hukuman Disiplin Sedang	1 orang
3.	Hukuman Disiplin Berat	2 orang
<b>JUMLAH</b>		3 orang

**Pelaksanaan Pelantikan Sumpah Janji PNS**

NO	Jumlah	Keterangan
1.	384 orang	Virtual
2.	4 orang	Langsung

**d. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN**

Dengan Indikator kinerja Persentase pelayanan administrasi ASN dan penataan jabatan ASN Lampung yang terdiri dari 3 sub kegiatan yaitu sebagai berikut :

**a) Pengelolaan Mutasi ASN**

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 46.000.000,- dengan realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 19.560.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 45.900.000,-

**Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan I Tahun 2021**

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	30
Prov Lampung ke.kab/kota	11
Kab/kota ke.Provinsi lampung	30
Antar kab/kota di Provinsi lampung	35
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
<b>JUMLAH</b>	<b>106</b>

**Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan II Tahun 2021**

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	30
Prov Lampung ke.kab/kota	10
Kab/kota ke.Provinsi lampung	15
Antar kab/kota di Provinsi lampung	70
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
<b>JUMLAH</b>	<b>125</b>

### Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan III Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	13
Prov Lampung ke.kab/kota	15
Kab/kota ke.Provinsi lampung	9
Antar kab/kota di Provinsi lampung	58
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
<b>JUMLAH</b>	<b>95</b>

### Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Triwulan IV Tahun 2021

Keterangan	Jumlah
Antar instansi	10
Prov Lampung ke.kab/kota	6
Kab/kota ke.Provinsi lampung	1
Antar kab/kota di Provinsi lampung	51
Prov lain ke.kab/kota Provinsi lampung	-
Kab/kota Prov lampung ke.Provinsi lain	-
Prov lampung keluar Provinsi lain	-
Prov lain masuk ke Provinsi lampung	-
<b>JUMLAH</b>	<b>68</b>

#### b) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat Periode April/Oktober dan Surat SK Kenaikan Gaji Berkala dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 122.309.800,- pada saat perubahan pagu anggaran mengalami pengurangan sebesar Rp. 30.000.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp. 92.309.800,- dengan realisasi pada Triwulan IV Rp. 14.930.000,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 42.059.200,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 50.250.600,- dikarenakan Pandemi Covid-19 pelaksanaan perjalanan dinas dibatasi sehingga pada kegiatan sosialisasi kenaikan pangkat periode April dan Oktober tidak terlaksana secara maksimal.

#### Kenaikan Pangkat PNS Periode April Triwulan III Tahun 2021

Bulan	2021
April	1.800
Oktober	-

#### Kenaikan Pangkat PNS Periode Oktober Triwulan IV Tahun 2021

Bulan	2021
April	-
Oktober	9.228

#### Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan I Tahun 2021

Golongan	Jumlah
I/ II	1895
III/IV	3037
IVc	6
<b>Total</b>	<b>4938</b>

#### Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan II Tahun 2021

Golongan	Jumlah
I/ II	387
III/IV	2872
IVc	45
<b>Total</b>	<b>3.304</b>

#### Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan III Tahun 2021

Golongan	Jumlah
I/ II	138
III/IV	458
IVc	1
<b>Total</b>	<b>597</b>

#### Surat SK Kenaikan Gaji Berkala Triwulan IV Tahun 2021

Golongan	Jumlah
I/ II	53
III/IV	772
IVc	20
<b>Total</b>	<b>845</b>

#### c) Pengelolaan Promosi ASN

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

dengan Pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.123.919.000,- lalu pada bulan April anggaran tersebut ter - Refocusing menjadi Rp. 876.889.000 yang dananya dialihkan untuk penanganan COVID – 19 pada saat perubahan 2021 pagu anggaran tersebut mengalami penambahan anggaran menjadi Rp. 966.889.000,- realisasi anggaran pada Triwulan IV sebesar Rp. 12.441.900,- sehingga realisasi anggaran dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV sebesar Rp. 556.600.400,- terdapat selisih anggaran sebesar Rp. 410.288.600,- dikarenakan penundaan untuk seleksi terbuka dan evaluasi JPTP.

#### **Pelantikan Pejabat Triwulan I**

<b>Esselon/Pejabat</b>	<b>Jumlah</b>
II (JPTP)	14
III (Administrator)	98
IV (Pengawas)	255
<b>Total</b>	<b>367</b>

#### **Pelantikan Pejabat Triwulan II**

<b>Esselon/Pejabat</b>	<b>Jumlah</b>
II f(JPTP)	9
III (Administrator)	4
IV (Pengawas)	-
<b>Total</b>	<b>13</b>

#### **Pelantikan Pejabat Triwulan III**

<b>Esselon/Pejabat</b>	<b>Jumlah</b>
II (JPTP)	1
III (Administrator)	2
IV (Pengawas)	1
<b>Total</b>	<b>4</b>

#### **Pelantikan Pejabat Triwulan IV**

<b>Esselon/Pejabat</b>	<b>Jumlah</b>
II (JPTP)	0
III (Administrator)	110
IV (Pengawas)	224
<b>Total</b>	<b>334</b>

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Seleksi Terbuka	5 Maret s/d 1 April 2021	- Pelamar Seleksi terbuka yang memenuhi syarat 43 orang	Terdapat 9 JPTP yang lowong, namun pada tahap akhir hanya terdapat 8 JPTP yang memenuhi syarat
2.	Uji Kompetensi	24 s/d 31 Desember 2021	4 Pejabat PTP	Untuk mengisi salah satu dari 7 Jabatan PTP yang lowong

### **3.3 Capaian Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah Triwulan IV Tahun 2021/IKU Perangkat Daerah**

Pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperhitungkan adalah seperti yang tertuang dalam IKU BKD Provinsi Lampung caranya adalah dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BKD Provinsi Lampung tahun 2021 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja pada Triwulan IV khususnya pada Indikator Sasaran Pertama yaitu Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi mengalami peningkatan sebesar 4.43% yaitu saat Triwulan III sebesar 63.5% sedangkan pada Triwulan IV naik menjadi 67.93% dikarenakan terdapat 140 CPNS Tahun 2021, Jumlah pejabat pelaksana yang dimutasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan masuk ke Provinsi Lampung sebanyak 138 orang dan Jumlah pejabat administrasi yang telah ditempatkan sesuai kompetensi Tahun 2021 sebanyak 694 orang .

Sedangkan pada Indikator Sasaran Kedua yaitu Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik pada triwulan IV menjadi 50% meningkat sebesar 4.2% dari triwulan II, dikarenakan peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian berbasis elektronik yaitu terlaksananya Video Aplikasi (Publikasi SAPKT), 4 video (SAPKT, e-Dokumen, e-KGB dan e-Pangkat) dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi.

Untuk mengukur tingkat persentase yang dicapai dengan mengumpulkan sumber data yang dibutuhkan terdiri dari :



- ▶ Jumlah (Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama) tahun 2021 sebanyak 49 orang;
- ▶ Jumlah Pejabat Fungsional yang telah ditempatkan sesuai kompetensi pada tahun 2021 sebanyak 9.358 orang;
- ▶ Jumlah CPNS 2021 yang telah ditempatkan sesuai kompetensi 140 orang;
- ▶ Jumlah pejabat administrasi yang telah ditempatkan sesuai kompetensi Tahun 2021 sebanyak 694 orang;
- ▶ Jumlah pejabat pelaksana yang dimutasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan masuk ke Provinsi Lampung sebanyak 138 orang;
- ▶ Jumlah PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 sebanyak 15.278 orang.

*(sumber data BKD Provinsi Lampung, Desember 2021)*

formulasi :



$$\frac{\text{Jumlah penempatan PNS yang sesuai dengan kompetensi}}{\text{Jumlah PNS (tahun berjalan)}} \times 100\%$$

$$\frac{10.379}{15.278} \times 100\% = 67.93\%$$

2. Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik, untuk mengukur tingkat persentase kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dilihat dari :
  1. Berapa banyak Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang telah dilaksanakan
  2. Penerapan Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun, berikut disajikan road map rencana Pengembangan Sistem Informasi ASN berbasis elektronik yang akan dilaksanakan :

**Tabel.05**  
**ROAD MAP RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ASN**  
**KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. SIMPEDU 2. E-KINERJA 3. SAPKT (Pengenalan dan Uji Coba) : • e-KGB • e-Pensiun • e-Cuti • e-SLKS • e-Formasi JFT • e-Formasi JFU	4. Sentralisasi Server (KOMINFOTIK) 5. Implementasi SAPKT 6. Pengembangan Aplikasi e-Kinerja berbasis Android (SIKAP) 7. Pengembangan Aplikasi e-Dokumen 8. Penambahan Jenis Layanan Online pada SAPKT • e-Tugas Belajar • e-Ijin Belajar • e-Pangkat 9. Sosialisasi Aplikasi e-Dokumen dan SAPKT (seluruh OPD, SMA, SMK dan SLB)	10. Pembangunan Aplikasi Seleksi Terbuka JPT 11. Penambahan Jenis Layanan Online pada SAPKT • e-KARIS/KARSU • e-KARPEG • e-Konversi NIP 12. Peremajaan e-Dokumen PNS pada seluruh OPD 13. Ujicoba Tanda Tangan Digital pada Surat Kenaikan Gaji Berkala 14. Video Aplikasi (Publikasi SAPKT), 4 video (SAPKT, e-Dokumen, e-KGB dan e-Pangkat)	15. Integrasi Database SIMPEDU dan Database SAPK BKN (Satu Data) 16. Pengembangan SIMPEDU • Back-End Process (Database SAPK) • Front-End Process 17. Pengembangan SAPKT • Back-End Process (Koneksi dengan Database SAPK) • Front-End Process 18. Pembangunan Dashboard Data Kepegawaian • EIS (Executive Information System) • Anjungan Data Kepegawaian 19. Peremajaan e-Dokumen ASN (lanjutan)	20. Re-Design Website BKD Provinsi Lampung. 21. Rencana PUPNSD (Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Daerah) Provinsi Lampung. 22. Peremajaan e-Dokumen ASN (lanjutan)	23. Monitoring dan Evaluasi Data Kepegawaian (seluruh OPD, SMA, SMK dan SLB) 24. Seluruh Pelayanan dan Informasi Berbasis Elektronik

 Pink : sudah dilaksanakan  
 Hijau : akan dilaksanakan

formulasi :

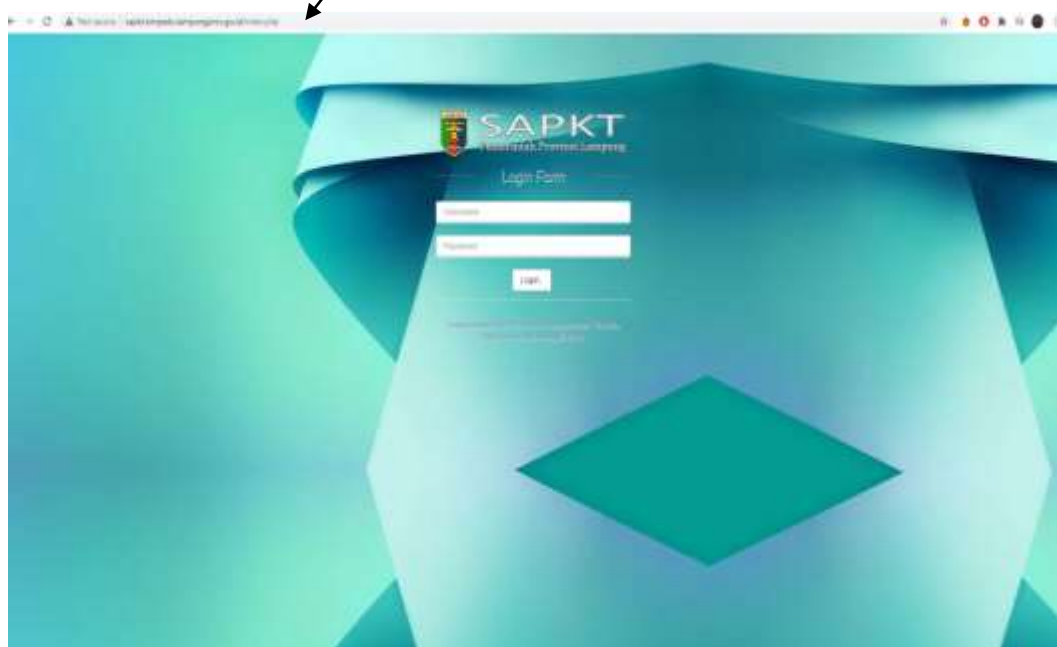
$$\frac{\text{Jumlah pengembangan sistem pelayanan administrasi kepegawaian}}{\text{Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian yang akan dikembangkan}} \times 100\%$$

$$\frac{12}{24} \times 100\% = 50\%$$

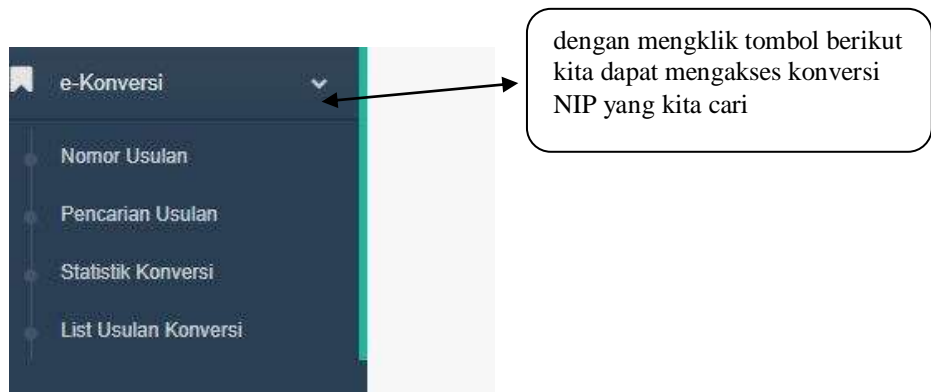
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik pada BKD Provinsi Lampung sampai dengan akhir Tahun 2021 Triwulan IV Bulan Desember sebesar 50% (yaitu dengan terlaksananya Pembangunan aplikasi seleksi terbuka JPT, penambahan jenis layanan online pada SAPKT karis karsu/karpeg, Video Aplikasi (Publikasi SAPKT), 4 video (SAPKT, e-Dokumen, e-KGB dan e-Pangkat). Berikut tampilan pengembangan aplikasi kepegawaian yang dapat dikembangkan oleh BKD Provinsi Lampung dalam kurun waktu satu tahun :

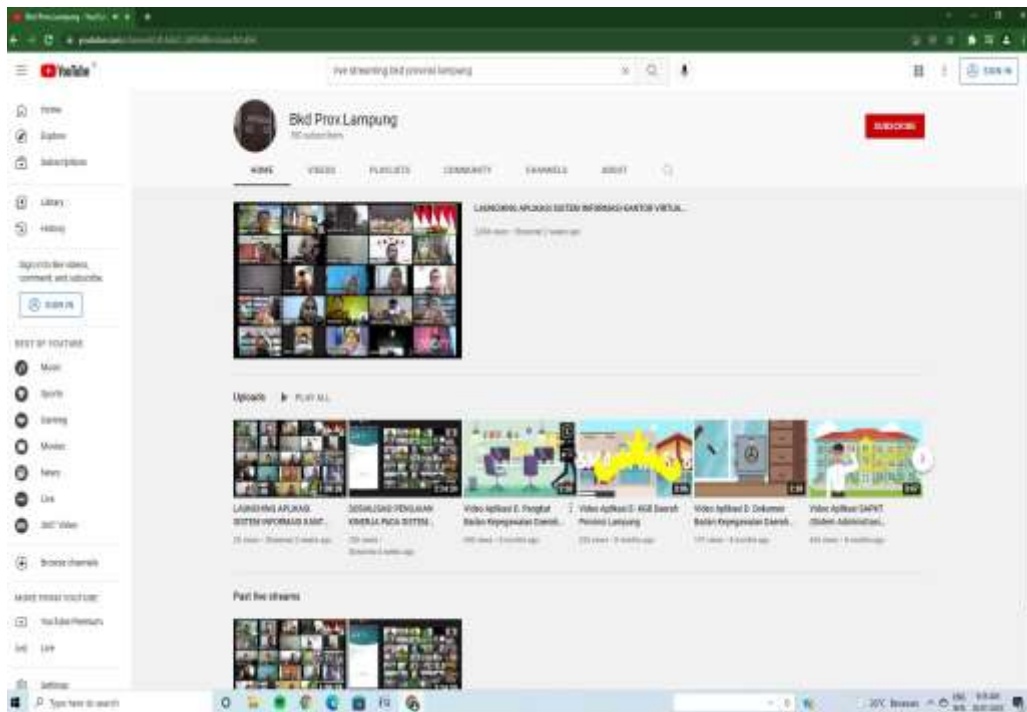


Masukan alamat link ([sapkt.simpedu.lampungprov.go.id](http://sapkt.simpedu.lampungprov.go.id))



Masukan password dan username, lalu akan keluar tampilan dibawah ini :





Dari video aplikasi tersebut diatas khususnya kita PNS Provinsi Lampung dapat melihat secara langsung video aplikasi e-KGB, e-Dokumen, e-Pangkat yang dapat memudahkan kita dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, sehingga tidak perlu datang secara langsung bertatap muka kekantor BKD Provinsi Lampung cukup dengan menyimak dan mengikuti prosedur yang telah di paparkan pada video tersebut.

**Tabel 0.6**  
**INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)**  
**BKD PROVINSI LAMPUNG**

No	ASPEK/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	2021		KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase penempatan PNS dalam jabatan sesuai kompetensi	Persen	65	67.93	104.50
2.	Persentase peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian berbasis elektronik	Persen	58	50	86.20

Menurut Permendagri 86 Tahun 2017 Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

No	Kategori/Interpretasi	Rata - Rata % Capaian
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

## **BAB IV**

### **HAMBATAN DAN KENDALA**

#### **4.1. Hambatan dan Kendala**

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung mengalami beberapa hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang ditemui selama dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Karena adanya Covid – 19 rutinitas dan kinerja perkantoran menjadi kurang maksimal, karena adanya pembatasan kegiatan yang bersifat keramaian.
2. Integrasi data yang belum memadai.
3. Kurang maksimalnya Sumber Daya Manusia dalam melakukan penginputan data kepegawaian.

#### **4.2. Upaya Pemecahan Masalah**

Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain sebagai berikut :

1. Penambahan anggaran sesuai kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Keakuratan dan integrasi data serta responsifitas yang tinggi dalam mengumpulkan dan mengentry data.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Laporan Evaluasi Rencana Kerja Triwulan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan, evaluasi rencana kerja triwulan dibuat setiap triwulannya untuk memudahkan mengukur tingkat capaian kinerja baik target capaian kinerja maupun target anggaran.

Dengan tersusunnya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Triwulan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 ini, diharapkan dapat menjadi gambaran kegiatan yang telah dilaksanakan dan menjadi acuan kedepan untuk memenuhi target selama satu tahun kedepan sesuai dengan apa yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan dapat bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan pemerintahan di tahun berikutnya.

#### **5.2 Rekomendasi**

Untuk peningkatan kualitas kinerja yang lebih baik maka diperlukan anggaran yang memadai, disamping itu diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas yang siap menerima setiap perubahan – perubahan teknologi yang baru. Anggaran yang disesuaikan dapat meningkatkan target kinerja yang ditentukan. Disaat sekarang ini banyaknya masalah yang dihadapi dengan adanya COVID 19, sehingga tatap muka dibatasi. Aktivitas perkantoran kurang efektif dan efisien, dengan keadaan yang seperti sekarang dapat menurunkan kinerja.



## Badan Kepegawaian Daerah

28.50430316

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>															
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>															
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	Jumlah Dokumen Perencanaan	52,00	224.579.064,00	0,00	0,00	13,00	52.105.000,00	13,00	50.250.000,00	100,00	96,44	13,00	50.250.000,00	25,00	22,38
2	5.03.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan dan Evaluasi Kinerja	36,00	201.628.583,00	0,00	0,00	9,00	46.780.217,00	9,00	46.651.000,00	100,00	99,72	9,00	46.651.000,00	25,00	23,14
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>															
3	5.03.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	56,00	49.384.420.921,00	0,00	0,00	14,00	11.642.629.759,00	14,00	11.468.630.751,00	100,00	98,51	14,00	11.468.630.751,00	25,00	23,22
4	5.03.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan kegiatan PWRI	8,00	1.077.531.250,00	0,00	0,00	2,00	250.000.000,00	2,00	237.314.000,00	100,00	94,93	2,00	237.314.000,00	25,00	22,02
5	5.03.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan SKPD	96,00	107.753.125,00	0,00	0,00	24,00	25.000.000,00	24,00	22.064.500,00	100,00	88,26	24,00	22.064.500,00	25,00	20,48
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>															
6	5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen dan peralatan listrik	568,00	32.771.173,00	0,00	0,00	142,00	7.603.300,00	140,00	7.603.300,00	98,59	100,00	140,00	7.603.300,00	24,65	23,20
7	5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	628,00	2.080.920.592,00	0,00	0,00	157,00	223.655.000,00	147,00	219.994.000,00	93,63	98,36	147,00	219.994.000,00	23,41	10,57
8	5.03.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	568,00	34.481.000,00	0,00	0,00	142,00	8.000.000,00	136,00	8.000.000,00	95,77	100,00	136,00	8.000.000,00	23,94	23,20
9	5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah lembar barang cetak dan penggandaan	3.212,00	86.202.500,00	0,00	0,00	803,00	20.000.000,00	757,00	20.000.000,00	94,27	100,00	757,00	20.000.000,00	23,57	23,20
10	5.03.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60,00	12.930.375,00	0,00	0,00	15,00	3.000.000,00	15,00	3.000.000,00	100,00	100,00	15,00	3.000.000,00	25,00	23,20
11	5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah ATK	6.696,00	130.981.208,00	0,00	0,00	1.674,00	30.396.800,00	1.375,00	30.394.300,00	82,14	99,99	1.375,00	30.394.300,00	20,53	23,21
12	5.03.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah Makan dan Minum kantor yang dilaksanakan	100,00	107.753.125,00	0,00	0,00	25,00	25.000.000,00	25,00	24.985.000,00	100,00	99,94	25,00	24.985.000,00	25,00	23,19
13	5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	244,00	2.418.105.119,00	0,00	0,00	61,00	524.229.000,00	60,00	524.093.844,00	98,36	99,97	60,00	524.093.844,00	24,59	21,67
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
14	5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48,00	1.097.169.227,00	0,00	0,00	12,00	254.556.243,00	12,00	111.782.403,00	100,00	43,91	12,00	111.782.403,00	25,00	10,19
15	5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran jasa administrasi keuangan	48,00	2.454.384.303,00	0,00	0,00	12,00	569.446.200,00	12,00	569.446.200,00	100,00	100,00	12,00	569.446.200,00	25,00	23,20
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>															
16	5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang dipelihara	100,00	1.031.576.697,00	0,00	0,00	25,00	171.998.000,00	25,00	162.371.991,00	100,00	94,40	25,00	162.371.991,00	25,00	15,74
17	5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	172,00	124.562.613,00	0,00	0,00	43,00	28.900.000,00	41,00	28.750.000,00	95,35	99,48	41,00	28.750.000,00	23,84	23,08
18	5.03.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	4,00	131.027.800,00	0,00	0,00	1,00	30.400.000,00	1,00	30.200.000,00	100,00	99,34	1,00	30.200.000,00	25,00	23,05
		<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>															
		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>															
19	5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Pengadaan ASN, Pengurusan Administrasi Kepegawaian dan luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi PTHL	36,00	23.879.447.361,00	0,00	0,00	9,00	5.005.274.194,00	7,00	3.902.046.432,00	77,78	77,96	7,00	3.902.046.432,00	19,44	16,34
20	5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah orang/pegawai yang diberhentikan	2.460,00	217.810.012,00	0,00	0,00	693,00	50.534.500,00	622,00	35.096.200,00	89,75	69,45	622,00	35.096.200,00	25,28	16,11

No	Kode Permendagri	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome) / Kegiatan(Outcome)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d Akhir Tahun Renstra		Realisasi Renstra s/d Tahun 2020		Target Kinerja Capaian Program (Renja PD) Tahun 2021		Realisasi Renja PD Tahun 2021		Tingkat Capaian Tahun 2021		Realisasi Kinerja s/d Tahun 2021		Tingkat Capaian (%)	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	RP	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5		6		7		8		9 = 8 / 7		10 = 6 + 8		11 = 10 / 5	
21	5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Dokumen Pembinaan Jiwa Korsa Bantuan Hukum Bagi Anggota KORPRI dan Lembaga Profesi ASN lainnya	12,00	3.260.763.343,00	0,00	0,00	3,00	189.715.679,00	1,00	89.797.500,00	33,33	47,33	1,00	89.797.500,00	8,33	2,75
22	5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi dan Maintenance	740,00	571.156.646,00	0,00	0,00	185,00	132.515.100,00	185,00	132.515.100,00	100,00	100,00	185,00	132.515.100,00	25,00	23,20
23	5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen di SIMPEDU dan SAPK yang Akurat serta Buku Penjagaan KP, BUP, Buku Bagan Struktur, DUK, Buku Saku, Buku Profil, Bagan Struktur, Data Pejabat	60.000,00	446.442.748,00	0,00	0,00	15.000,00	88.580.000,00	15.000,00	88.248.500,00	100,00	99,63	15.000,00	88.248.500,00	25,00	19,77
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>																	
24	5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Alih Tugas dan Penataan PNS	3.400,00	198.265.750,00	0,00	0,00	850,00	46.000.000,00	776,00	45.900.000,00	91,29	99,78	776,00	45.900.000,00	22,82	23,15
25	5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah PNS yang Menerima SK Kenaikan Pangkat PNS dan Surat Kenaikan Gaji Berkala	60.000,00	527.170.527,00	0,00	0,00	15.000,00	92.309.800,00	15.000,00	42.059.200,00	100,00	45,56	15.000,00	42.059.200,00	25,00	7,98
26	5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah PNS yang akan menduduki jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi	380,00	4.844.231.380,00	0,00	0,00	95,00	966.889.000,00	95,00	556.600.400,00	100,00	57,57	95,00	556.600.400,00	25,00	11,49
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>																	
27	5.03.02.1.03.01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah PNS yang Mengikuti Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan dan pejabat yang telah mengikuti kompetensi	2.232,00	2.472.443.287,00	0,00	0,00	595,00	402.636.098,00	348,00	366.131.500,00	58,49	90,93	348,00	366.131.500,00	15,59	14,81
28	5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Praja IPDN yang terbina dan jumlah PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar	600,00	1.843.340.964,00	0,00	0,00	150,00	364.476.915,00	150,00	306.734.100,00	100,00	84,16	150,00	306.734.100,00	25,00	16,64
29	5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Orang yang ditata dan dibina dalam Jabatan Fungsional	800,00	266.089.877,00	0,00	0,00	200,00	61.736.000,00	200,00	49.811.100,00	100,00	80,68	200,00	49.811.100,00	25,00	18,72
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>																	
30	5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen penerima SLKS, dan ucapan ulang tahun bagi pejabat struktural dan Anggota DPRD, evaluasi, monitoring evaluasi kinerja di OPD dan sekolah di lingkungan Pemprov Lampung	48,00	1.229.148.518,00	0,00	0,00	12,00	285.177.000,00	9,00	239.581.700,00	75,00	84,01	9,00	239.581.700,00	18,75	19,49
31	5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah dokumen PNS yang terkena hukuman disiplin, perceraian, dan sumpah janji	12,00	212.530.109,00	0,00	0,00	3,00	49.309.500,00	2,00	44.057.900,00	66,67	89,35	2,00	44.057.900,00	16,67	20,73
<b>Rata-Rata capaian kinerja %</b>												91,95	88,38			23,11	19,00
<b>Predikat kinerja</b>												sangat tinggi	tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah

#### Monitoring Faktor

Faktor Pendorong keberhasilan kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya

SDM, Pagu anggaran serta sarana dan prasarana

SDM, anggaran yang kurang maksimal dan fasilitasi sarana parasarana memaksimalkan anggaran serta target yang akan dicapai

lebih memperhatikan lagi pagu dan target capaian yang akan dilaksanakan, agar kinerja dapat terlaksana dengan baik

Bandar Lampung, Januari 2022  
Mengetahui,  
Kepala Badan Kepegawaian Daerah  
Provinsi Lampung,

**YURNALIS, S.IP**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19690710 199003 1 006